

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

BPRD DKI Usul Rp 128,9 M Beli Satu Set Komputer

Palmerah, Warta Kota

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menerapkan sistem untuk memetakan potensi pajak secara riil.

Terkait hal itu Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta meniru langkah DJP Kemenkeu menerapkan sistem tersebut. Demikian diungkap Kepala BPRD DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, Kamis (5/12).

Karena itu, BPRD DKI mengusulkan pengadaan satu unit komputer lengkap dengan perangkatnya sebagai big data sistem itu. Total anggaran yang diusulkan untuk pengadaan komputer itu sebesar Rp 128,9 miliar. Besaran anggaran itu diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2020.

"Kegiatan ini kami meniru ke sana, di pajak pusat angkanya kurang lebih Rp 600 miliar," ujar Faisal dalam rapat pembahasan RAPBD 2020 antara Pemprov DKI dan Komisi C DPRD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/12).

Selain menerapkan sistem pemetaan potensi pajak, BPRD DKI Jakarta juga menerapkan pelaporan pajak secara online untuk para pelaku usaha hotel, restoran, tempat hiburan, dan parkir. Tujuannya untuk mengetahui besaran pajak yang harus disetorkan para pelaku usaha ke kas daerah dan mempermudah pengawasannya.

Saat ini BPRD BPRD DKI

sedang menguji coba sistem tersebut. Faisal menambahkan, sudah ada sekitar 1.000 pelaku usaha yang menerapkan sistem online ini.

Menurut Faisal, DJP Kemenkeu ingin meniru sistem online tersebut. "Saat kemarin kami kunjungan ke Direktorat Jenderal Pajak, justru mereka ingin meniru kami untuk kegiatan online system ini. Mereka akan lakukan April, kami mulai di Januari, sekarang kami sudah pasang, trial," kata Faisal.

Dipertanyakan

Dilihat dari situs web apbd.jakarta.go.id, pengadaan komputer itu terdiri dari pembelian satu unit komputer, dua unit storage area network (SAN) switch, enam unit server, dan sembilan unit storage untuk mainframe.

Total anggaran yang diusulkan Rp 128.992.331.600 dengan rincian, satu unit komputer mainframe Z14 ZR1 seharga Rp 66,6 miliar (dengan PPN), dua unit SAN switch seharga Rp 3,49 miliar (dengan PPN), enam unit server seharga Rp 307,9 juta (dengan PPN), sembilan unit storage untuk mainframe seharga Rp 58,5 miliar.

Sementara, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Anthony Winza Probowo, mempertanyakan besarnya anggaran untuk pengadaan satu unit komputer dan perangkatnya itu. Anthony meminta BPRD DKI menjelaskan hasil yang akan didapatkan pemerintah setelah

menggunakan alat tersebut.

Dia juga meminta BPRD DKI membandingkan perangkat komputer tersebut dengan perangkat komputer yang digunakan Kementerian Keuangan untuk mengelola data pajak.

"Perbandingan dengan nasional itu bagaimana. Jangan sampai nasional saja nggak pakai alat segini, tapi Jakarta pakai alat yang satu unitnya Rp 60 miliar," ucap Anthony. (kompas.com)



Faisal Syafruddin

Kompas.com/Nursita Sari

Stiker Penunggak Pajak

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafrudin, menyatakan, bakal menandai penunggak pajak kendaraan mobil dengan metode penempelan stiker.

Menurutnya, langkah ini dapat berdampak positif dalam menuntaskan permasalahan penyerapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jakarta, khususnya kendaraan roda empat.

"Seluruh mobil yang menunggak (pajak) di DKI Jakarta akan kita tempelin stiker. Ini sebagai efek supaya mereka segera melunasi pajaknya," kata Faisal, Kamis (4/12). Faisal menjelaskan, kebijakan itu turut mempercepat proses penyerapan PKB dari para penunggak pajak.

Pasalnya, realisasi penyerapan PKB baru mencapai 80 persen dari target potensi penyerapan sebesar Rp 44,54 triliun. "Potensi kami untuk pajak kendaraan bermotor masih ada kurang lebih hampir Rp 2 triliun yang belum membayar," jelasnya.

Selain itu, bentuk stiker yang bakal dipasang bagi penunggak pajak mobil serupa dengan stiker penunggak pajak bangunan yang telah banyak dipasangkan di beberapa bangunan penunggak pajak.

Ia menjelaskan, prosedur pemasangan stiker bakal dilakukan pihaknya bila penunggak tak menghiraukan teguran secara tiga kali dalam tiga pekan peringatan. "Jadi, setelah imbauan, lalu satu hingga tiga bulan tidak ada pembayaran, langsung kami pasang stiker," pungkas Faisal. (m23)